Peranan Staf Komisi Dalam Menunjang Aktivitas Kegiatan Komisi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Meranti

by Dosen Uwp

Submission date: 11-Feb-2025 11:36AM (UTC+0700)
Submission ID: 2585419866
File name: RAKYAT_DAERAH_KABUPATEN_MERANTI_-_SUMITA_WIDIYAH_NINGSIH_1.pdf (168.48K)
Word count: 3349
Character count: 21986

MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik) **Vol. 4 No.3 ISSN 2615-2142**

PERANAN STAF KOMISI DALAM MENUNJANG AKTIVITAS KEGIATAN KOMISI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANTI

Efriyadi
efriadi11@gmail.com
Staf Ahli DPRD Meranti

Hadi Susanto
Esa Wahyu Endarti
Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

The aim of the study is to present a comprehensive description of the role of staff, the factors that support the role of administration and political access and recommend an effective role of administration in supporting the activities of the commission in the Regional House of Representatives of Meranti Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The focus of the study in this research is the administrative role and political access of commission staff at the Meranti Regency Regional People's Representative Council which is carried out formally and informally. The research includes the role of commission staff, factors that support the role of administration and political access and recommendations for the effectiveness of the administrative role and political access of commission B (Economy) staff in the Regional House of Representatives of Meranti Regency. Developments and environmental changes in political life have colored the attitude of relations between the legislative and executive bodies in the past towards the opinion that DPRD commission staff are only limited to being part of local government. This gave rise to a discourse that the existence of the DPRD Commission B staff at that time as staff who followed the orders of the members of the council wherever the members of the council held plenary meetings, work visits or others.

Keywords: the role of commission staff, the activities of the people's representative council

ABSTRAK

Tujuan penelitian menyajikan deskripsi secara komprehensif tentang peran staf, faktor–faktor yang mendukung peran administrasi dan akses politik serta merekomendasikan supaya efektif peran administrasi dalam menunjang kegiatan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Meranti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah peran administrasi dan akses politik staf komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Meranti yang dilakukan secara fomal dan informal. Penelitian meliputi peran staf komisi, faktor-faktor yang mendukung peran administrasi dan akses politik dan rekomendasi supaya efektivitas peran administrasi serta akses politik staf komisi B (Perekonomian) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Meranti. Perkembangan dan perubahan lingkungan dalam kehidupan politik telah mewarnai sikap hubungan antarbadan legislatif dan eksekutif dimasa lalu terhadap pendapat bahwa staf komisi DPRD hanyalah sebatas sebagai bagian dari pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan wacana bahwa eksistensi staf Komisi B DPRD pada masa itu sebagai staf yang bersifat mengikuti perintah anggota dewan dimanapun anggota dewan melakukan rapat paripurna, kunjungan kerja atau yang lainnya.

Kata kunci: peranan staf komisi, aktivitas dewan perwakilan rakyat

PENDAHULUAN

Seperti yang tertuang dalam UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang secara artificial dalam era reformasi ini telah mengalami pergeseran, baik dalam peran maupun fungsi eksekutif cukup dominan bahkan fungsi legislatif pun diperankan oleh eksekutif. Seperti ditegaskan oleh Miriam Budiarto: "telah menjadi gejala umum bahwa titik berat dibidang legislatif telah bergeser ke tangan eksekutif'. (Miriam Budiarto, 1994: 299).

Berdasarkan kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengundang arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggungjawab. seperti yang dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2004, dengan kata lain bahwa DPRD merupakan lembaga yang berperan sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan sosial.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga yang mewakili semua lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Meskipun pada kenyataannya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Staf Komisi adalah semua orang yang membantu pimpinan komisi. Staf Komisi bergerak dibidang *lini* (bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Komisi Kabupaten Kepulauan Meranti), maupun bergerak di bidang *staff* (bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas penunjang), Dalam konteks manajemen modern, Kelembagaan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berorientasi kepada *problem solving,* yang berpengaruh terhadap penentuan kebijakan maupun yang bersifat operasional. Pemecahan masalah memerlukan dukungan staf komisi *(completed staff work).*

Ada dua peran yang dilaksanakan staf komisi antara lain dalam bentuk administrasi sesuai dengan tupoksinya dan akses politik dalam staf komisi, kemampuan berkomunikasi dengan kepala OPD tanpa melalui jalur birokrasi, staf Komisi mempunyai kedudukan yang kuat karena faktor kedekatan dengan anggota dewan. (1) *Advisory Staff :* tugasnya bersifat pemikiran *(think-tank)* untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional yang erat kaitannya dengan pencapaian dan penyelesaian tugas pokok Komisi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. (2) *Service Staff (auxiliary staff) :* tugasnya memberikan "bantuan administrasi" sebagai penunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok Komisi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini untuk menyajikan deskripsi secara komprehensif tentang peran staf Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Menyajikan deskripsi secara komprehensif tentang faktor-faktor yang mendukung peran administrasi dan akses politik staf Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyajikan deskripsi secara komprehensif tentang Rekomendasi apa yang diinginkan supaya efektifitas peran administrasi dan akses politik staf Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) dalam rangka menunjang kegiatan Komisi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti kedepan.

TINJAUAN TEORETIS

Kata peranan ini sebenarnya menunjukan pada aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi. Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata "Peran" ini diberi akhiran "an" maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminta 1985 : 735). Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memgang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata dalam "peranan" bukan hanya berarti sebagai kata benda tapi juga berarti suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Peranan tidak lepas kaitannya dengan status dan kedudukan seseorang/lembaga. Oleh karena itu dalam setiap pembahasan mengenai peranan selalu dikaitkan dengan kedudukan dan posisi.

Berkaitan dengan efektivitas kinerja staf komisi di lingkungan Sekretariat DPRD lampung ini telah pernah diadakan penelitian oleh jurusan ilmu administrasi Negara Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas lampung Bandar lampung. Hasil dari penelitian tersebut di antaranya adalah :

1. Peran Staf DPRD Provinsi Lampung di Era Otonomi Daerah saat ini sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat dari pelaksanaan program kerja staf DPRD yang telah dijalankan dengan hasil cukup dapat membantu kinerja anggota dewan yang sesuai kinerja anggota dewan menampung aspirasi masyarakat dengan menggunakan sistem reses. Sehingga bentuk aspirasi masyarakat lebih tersaring dan mudah untuk dikategorikan dalam bentuk seperti apa.
2. Selain fungsi-fungsi tersebut, DPRD juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi-fungsi tadi. Tiga fungsi DPRD tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya karena ini akan berkaitan dengan peran DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perwakilan, dengan tugas dan tanggung jawab staf Komisi yang begitu berat tidak hanya menjalankan tugas administrasi tetapi tugas politik yang selama ini dijalankan guna membantu tugas anggota dewan sesuai dengan tupoksinya.

Good Governance

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa perkataan governance pada mulanya digunakan dalam dunia usaha dan konsep governance ini mempunyai arti yang penting dalam keberhasilan usaha, sehingga konsep Good Governance menjadi populer, dan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia dan IMF meletakkan Good Governance sebagai kriteria Negara-Negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh bantuan optimal dan Good Governance dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan.

Bintoro Tjokroamidjojo memandang Good Governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi Agent of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam Negara berkembang. Agent of change karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi planned change (perubahan yang

berencana), maka disebut juga Agent of Development. Agent of Development diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa.

Perilaku Organisasi Publik

Pengertian perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mengamati tentang pengaruh perilaku individu, kelompok dan perilaku dalam struktur organisasi dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi.

Dari pengertian tersebut diatas berdasarkan tesis bahwa pengertian manajemen ialah pencapaian tujuan dengan bantuan orang lain, maka manajemen harus memusatkan pada hubungan antar orang. Hal ini kadang-kadang juga disebut penelahaan "human relation", "leadership" atau "behavioral sciences approach". Pada perilaku keorganisasian dikembangkan teori-teori baru, metode dan teknik ilmu pengetahuan sosial dalam peristiwa-peristiwa antara perorangan dan dalam hubungan perorangan sampai pada hubungan kebudayaan. Dengan kata lain hubungan ini menekankan pada aspek kemanusiaan didalam manajemen, dengan prinsip apabila orang-orang bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka sudah seharusnya apabila orang sudah mengerti orang lain yang menjadi teman/kelompok kerjanya.

Secara sederhana reformasi dapat dipahami sebagai perubahan menuju tatanan yang lebih baik. Jadi bukan sekedar perubahan. Dengan sendirinya, tidak semua perubahan dapat dikategorikan sebagai reformasi. Hanya perubahan sistematis dan terencana *(systematic and planned change)* yang di arahkan untuk melakukan transformasi secara mendasar dengan *outcomes* yang lebih baiklah yang dapat disebut sebagai reformasi (Cooper, *1998).*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara nyata tentang suatu kondisi atau keterkaitan hubungan antara berbagai kejadian secara actual dan teratur. Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah peran administrasi dan akses politik staf komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan dengan cara formal / terstruktur dan cara informal / tidak terstruktur. Penelitian dilakukan terhadap staf, Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Meranti . sampling dari penelitian ini adalah Sekretarist DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Staf Komisi dan Narasumber.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, studi lapangan ,Observasi / pengamatan, wawancara / interview dan dokumentasi. Teknik pengambilan data yang digunakan peneliti yaitu sampling dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan untuk memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.

Analisa data ini dilakukan setelah data-data yang diperoleh terkumpul. Dalam hal ini analisa data yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2005 : 91 - 101) dengan mengutip pendapat Miles dan Huberman (1984), analisa data ini terdiri dari : reduksi data,penyajian data dan verifikasi (menarik kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum berdirinya Kabupaten Meranti, DPRD berada di Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti) dan setelah keluarnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 diresmikan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 19 Desember 2009 oleh Menteri Dalam Negeri RI. Setelah diresmikan Kabupaten Kepulauan Meranti maka terbentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana pembentukan keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Periode pertama Tahun 2009 – 2014 dilakukan dengan penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara parpol peserta Pemilu tahun 1999 yang dilaksanakan di Kabupaten Berngkalis.

DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah. Dalam kedudukannya sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Sama halnya dengan DPRD Kabupaten yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintah pula, namun dalam kedudukannya DPRD menjadi unsur Pemerintah Kabupaten dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Kabupaten.Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan unsur pelayanan DPRD Kabupaten Meranti yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bertanggung jawab pada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menfasilitasi serta mengkoordinasikan tenaga berkompeten dibidangnya sesuai yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD (b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD (c). Fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat DPRD (d) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap anggota DPRD menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD adapun jumlah fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.

Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Pimpinan Fraksi terdiri atas dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris. Fraksi mempunyai tugas :1) untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya (2) untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi (3) untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para Anggota (4) Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu.

Komisi merupakan unit kerja pokok yang membidangi masalah-masalah tertentu. Hampir sebagian aktivitas yang berhubungan dengan fungsi-fungsi DPRD, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPRD (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada dasarnya, pengisian keanggotaan komisi terhubung erat dengan latar belakang keilmuan atau kemampuan anggota menguasai terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Komisi di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti adalah : (1) Komisi I Hukum dan Pemerintahan, Komisi yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan negeri (2) Komisi II Perekonomian dan Pembanagunan Komisi (3) III Pendidikan dan Kesehatan (4) kinerja dari Staf Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih perlu banyak perbaikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Selama observasi peneliti menjumpai beberapa hal yang

masih kurang dalam kinerja Staf Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya di Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dikarenakan jumlah staf Komisi I hanya tujuh orang staf Komisi I dan harus melayani 9 anggota dewan yang ada di komisi, apabila terjadi permintaan bersama-sama untuk melayani maka tugas staf komisi akan pontang panting dalam melayani permintaan anggota komisi I. Hal ini dipertanyakan, jika jumlah staf komisi hanya 7 orang akan mengganggu sebuah kelancaran administrasi di Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, akibat kemampuan atau kapasitas jumlah mereka kurang, bagaimana bisa memfasilitasi Anggota dewan yang notabene sebagai wakil rakyat :

Hal tersebut juga tidak mendapat dilihat dari penanganan khusus dari para kepala bagian dan sub bagian. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya perbaikan system dalam bekerja yang menjadi perhatian khusus bagi para pimpinan. Bahkan arahan pimpinan hanya dilakukan sesekali saja, dan ketika staf Komisi B terus melakukan sikap-sikap tersebut, pimpinan sepertinya acuh, dan tidak menindak sebagaimana mestinya. Hal ini membuat masalah-masalah tersebut sulit dihilangkan dan seperti telah menjadi budaya dalam lingkungan Staf Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan banyak sekali pendapat yang menyatakan bahwa kinerja terdiri dari beberapa unsur. Begitu pula dengan kinerja pegawai di lingkungan staf Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, yang masih butuh banyak peningkatan dari aspek kinerja para pegawainya. Disini pegawai di staf komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum dapat memenuhi fungsinya sebagai pegawai. Dibuktikan dengan serangkaian ' perilaku indisipliner yang dilakukan seperti tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, dikarenakan jumlah staf kurang banyak serta yang dilayani cukup banyak. Menunjukkan selain staf komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti kurang bagus, juga menampilkan kurangnya tanggung jawab mereka sebagai Staf komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut penelitian Penulis ada mempengaruhi kinerja pegawai di Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti ada beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Individual
    1. Kapasitas
       Hal ini terkait dengan kapasitas Staf komisi yang dimaksud. Dimana dari ke 20 Staf komisi diantaranya 7 staf Komisi I yang ada mayoritas adalah punya pemahaman dengan berlatar pendidikan yang berbeda, terlebih staf harus melayani anggota dewan dan juga taat pada aturan di sekretariat dewan, Staf komisi sangat membutuhkan kecermatan dan kepiawaian seseorang dalam hal pelayanan tersebut. Bagaimana menjalankan pelayanan jika Staf komisi tidak punya keahlian individu yang efektif dan mempunyai daya efektifitas yang dapat menjawab kebutuhan anggota dewan dan sekretariat dewan.
    2. Lata Belakang
       Selain pada kapasitas, faktor latar belakang keilmuan dan latar belakang pekerjaan menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala yang mempengaruhi kinerja pegawai di Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan fungsi melayani kepada anggota dewan.

       Menjadi ironis manakala lembaga yang bertugas melayani anggota

dewan diisi oleh orang-orang dengan pengalaman minim dibidangnya. Tidak heran ketika aturan yang dihasilkannya banyak yang berorientasi pada pemenuhan solusi pemerintahan yang tidak sistematis.

3. Kemauan
   Kapasitas yang kurang dan latar belakang yang rendah sebetulnya bukan faktor utama kendala yang mempengaruhi kinerja pegawai di Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti selama punya kemauan yang tinggi untuk belajar dan terus meng *up grade* diri dengan informasi yang selalu terbaru. Namun demikian harapan ini hanya tinggal harapan mana kala dengan kemampuan yang minim tersebut tidak diimbangi dengan kemauan belajar yang tinggi demi pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Faktor Hambatan dari Staf Komisi

Dalam penelitian ini diketahui yang menjadi penghambat dalam staf komisi guna menunjang kinerja melihat beberapa temuan peneliti diantaranya adalah

:

Tabel 1

Temuan analisis peran staf komisi dalam akses politik

PERAN ADMINISTRASI	TEMUAN PENELITI
1. Melakukan kinerja administrasi membantu anggota komisi dalam melaksanakan tugas-tugas komisi. 2. Menyiapkan bahan rapat dan agenda rapat komisi dalam kegiatan rutinitas komisi. 3. Melaksanakan pelaporan bentuk SPJ perjalanan dinas anggota komisi. 4. Menganggarkan perjalanan dinas anggota komisi	1. Kepatuhan atau kestiaan terhadap kerja administrasi lebih kepada anggota komisi dibanding dengan sekretariat. 2. Kurang tanggapnya adminitrasi sekretariat dibanding anggota komisi.
AKSES POLITIK	TEMUAN PENELITI
1. Dalam bentuk kedekatan staf komisi kepada anggota dewan 2. Keahlian dalam bekerja menguasai dalam segala bidang komisi 3. Rasa kenyamanan kepegawaian atau lebih enjoy di staf komisi dan masalah kultur (budaya) membangun kedekatan emosional dengan anggota dewan sifatnya rutinitas.	1. Pemindahan staf komisi lebih sulit, SK mutasi dihiraukan oleh staf komisi karena mendapatkan perlindungan anggota komisi. 2. Dirasa kinerja bagus staf komisi dan lebih pada kedekatan anggota dewan baik, sehingga pola mutasi tidak bisa dilakukan oleh sekretariat. 3. Peran dan keikutsertaan staf komisi lebih dominan pada kerja akses politik dibandingkan dengan akses kinerja administrasi.

Sumber : Hasil observasi lapangan

SIMPULAN

Aktivitas yang dilakukan oleh staf komisi terhadap anggota dewan dapat membantu proses berlangsungnya administrasi dan juga politik, selain itu juga manfaat adanya staf komisi sebagai penghubung komunikasi antar kemitraan, badan legislatif dan eksekutif. Kemajuan dan perubahan lingkungan dalam kehidupan politik telah mewarnai sikap hubungan antar badan legislatif dan eksekutif dimasa lalu terhadap suatu pendapat bahwa keberadaan staf komisi DPRD hanyalah sebatas sebagai bagian dari pemerintah daerah. Hal ini ,memunculkan wacana bahwa eksistensi staf Komisi I DPRD pada masa itu sebagai staf yang bersifat mengikuti perintah anggota dewan dimanapun anggota dewan melakukan rapat paripurna, kunjungan kerja atau yang lainnya.

Menurut hasil wawancara, Kinerja staf komisi lebih berat dibanding tugas dan tanggung jawab staf yang lain, kami tugas kerjanya mendampingi anggota dewan yang ada di Komisi I kemanapun dimanapun anggota dewan kunker, rapat, dll, apapun secara politik dan administrasi kami yang terlibat, dari mulai menyiapkan berbagai macam kebutuhan guna kungker misalnya kami yang menyiapkan berbagai macam kebutuhan akomodasi walaupun itu dikoordinasikan kepada sekretariat DPRD, tetapi tugas kami berat sekali dari mulai berangkat harus mengawal membuat agenda serta hingga pelaporan keuangan dan SPJ kita yang melakukan itu semua, benar jika kita mau di mutasi kebagian yang lain masih dipertahankan oleh anggota dewan dikarenakan kita sudah dirasa bisa baik melayani anggota dewan dalam sudut pandang politik maupun administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju *Good Governance*. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta : Edisi Februari 2007. www.reformasibirokrasi.com

Gie, Kwik, Kian. 2003. *Reformasi Birokrasi dalam mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintah.* (Online). Http://www.Bappenas.Go.id_ Index.Php_Module = file manager = download & pathext = Content Express &view = 167 Reformasi% 20 Kinerja.Pdf) diakses 10-10-2013.

Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjun Surjaman. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Darwin, Muhadjir, 2000, *Good Governance dan Kebijakan Publik,* Makalah disampaikan dalam Forum Seminar Forum LSM Yogyakarta bertema : Mewujudkan Good Governance sebagai Agenda Sebuah Negara Demokrasi, tanggal 30 September 2000, Yogyakarta

Adam I Indrawijaya, 1989, "Perilaku Organisasi" Bandung Sinar Baru "Thibaut and Kelley yang dikutip oleh Adam I Indrawijaya

Udai Pareek, 1984, "Perilaku Organisasi" PT. Pustaka Binaman Presindo Jakarta

Basri, Muhammad Chatib, 1999, "Indonesia : The Political Economy of Policy Reform, "in Arief Budiman, Barbara Hatley and Damien Kingsbury (eds.), *Reformasi : Crisis and Change in Indonesia,* Clayton : Monash Asia Institute.

Bappenas, 2004. Rancangan Rencana Pembangunan Nasional Transisi

Peranan Staf Komisi Dalam Menunjang Aktivitas Kegiatan Komisi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Meranti

ORIGINALITY REPORT

17%	%	17%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Mustamin H. Idris, Rahmad Hidayat, Mahsar Mahsar. "Analisis Proses Formulasi Peraturan Daerah (Studi Pada Peran DPRD Lombok Barat Dalam Proses Formulasi Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Lombok Barat)", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2019 Publication	6%
2	Juliessi Paranga. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua", KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2020 Publication	2%
3	Rosidi Rosidi, Irwan Setiadi. "Peranan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi E Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Bidang Pendidikan", Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, 2017 Publication	2%
4	Riang Anggraini, Rudi Subiyakto, Nur Ilmiah Rivai. "Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bintan", JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2024	2%

Publication

5	Amrizal Achmad, Belli Nasution, Muchid Muchid. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Kompensasi Sebagai Variabel Moderating", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2022 Publication	1 %
6	Abang Zainudin. "PELAKSANAAN KEGIATAN KEPROTOKOLAN OLEH SUB BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN DOKUMENTASI", FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 2017 Publication	1 %
7	Hellen Last Fitriani, Nurhadi Nurhadi. "Hukum Tata Negara tentang Pemerintah dan Otonomi Daerah", YASIN, 2022 Publication	1 %
8	Marni Marni, Sulfa Sulfa, Wa Ode Reni. "PERANAN GURU SEBAGAI MOTIVATOR DALAM PEMBELAJARAN PPKn STUDI DI SMPN 2 BOMBANA", SELAMI IPS, 2020 Publication	1 %
9	Ahmad Ardiansyah. "PENGARUH KOMUNIKASI DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKERTARIAT DPRD KABUPATEN KARAWANG", Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2019 Publication	1 %
10	Nanda Rizkia Rahila. "PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN KOTA	1 %

BANDA ACEH NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN)", Jurnal Transformasi Administrasi, 2021

Publication

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		